

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung: 1991
- Abubakar, Iskandar dkk. 2010. *Transportasi Penyeberangan*, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta
- Gautama Candra dan B.N. Marbun, *Hak Asasi Manusia, Penyelenggaraan Negara yang Baik, dan*
- Gautama Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973. Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Presindo, Jakarta,
- Glenn R. Negley, "Justice", dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13, Crowell_Co- Ilier, 1970
- Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta. 2002. hlm. 104.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ikshantono. 2009. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Transportasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Transportasi di Kota Medan*, Skripsi. Medan : FEUSU
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, 1993, Jakarta
- International Commissions of Jurists, *The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age*, International Commissions of Jurists, Bangkok, 1965.
- International Maritime Organization, "*Standards Of Training, Certification and Watchkeeping for Sailors Convention, As Amended in 1995*".
- Muzayin Ar, *Ideologi Pancasila, Bimbingan Ke Arah Penghayatan Dan Pengamalan Bagi Remaja*,
- Nagel Thomas, *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public affairs 33, 2005.
- Nasution Adnan Buyung, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007.
- Nasution. 2008. *Manajemen Transportasi* edisi 3. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 7.
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 29.
- Prasetyo Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Prihartono*, Bambang. 2015. *Pengembangan Tol Laut dalam RPJMN 2015-2019 dan Implementasi 2015*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia

- Prihartono, Bambang, Chandra Irawan, Bastian dan Wayan Deddy Wedha Setyanto. 2015. *Konsep Tol Laut dan Implementasi 2015-2019*. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Republik Indonesia
- Santoso, Amir dan Riza Sihbudi. 1993. "Politik, Kebijakan dan Pembangunan." Jakarta : Penerbit Dian Lestari Grafika
- Santoso, Amir dan Riza Sihbudi. 1993. *Politik, Kebijakan dan Pembangunan*. Jakarta
- Sapoetra R. G. Karta, *Sistematika Hukum Tata Negara*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Saraswati L.G, *Hak Asasi Manusia Teori, Hukum, Kasus*, Filsafat UI Press, Depok, 2006. Savitri Niken, *HAM Perempuan*, PT. Refika Aditama, Cet. 1, Bandung, 2008.
- Sasono, Herman Budi. 2012. *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor*, Semarang: Universitas Diponegoro hal. 66
- Sidharta Bernard Arief, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010.
- Singarimbun, Masri dan Efendi Sofwan, 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Sjarif Amiroedin, *Perundang-undangan Dasar; Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Rineka
- Skripsi LG Silalahi tahun 2010 USU "Analisa Pemilihan Moda Transportasi Bus
- Soeratno. 1995. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN
- Tri Cahyadi. 2017. *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pelaut Di Kapal Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi PDIH Unissula. Semarang.
- Triadmojo, Bambang. 2010. *Perencanaan Pelabuhan*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Tubrukan Antara KM. Indimatam V dengan KM. Trisal Pratama*, Investigasi Kecelakaan Kapal Laut KNKT. Januari. 2011.
- Tubrukan Antara KM. Indimatam V dengan KM. Trisal Pratama*, Investigasi Kecelakaan Kapal
- Ubaidillah A., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, AIN Jakarta press, Jakarta, 2000.
- Universality of Human Rights in a Pluralistic World*, dilaporkan oleh Dewan Eropa,
- Unoto, *Filsafat Sosial dan Politik Pancasila*, Andi Offset, Yogyakarta, 1989.
- Utomo. 2017. "Implementasi Yuridis Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan Di Lintas Penyeberangan Ketapang – Gilimanuk", *Skripsi*, Surabaya : Universitas Negeri Surabaya.
- Widodo, Joko. (2007). *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*. Yogyakarta: Medpress.

B. Perundang-undangan:

- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64.
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 9.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

C. Jurnal/Makalah/Artikel

Amir, HT., 2007. *Pengembangan Program Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja Instruktur dan Pengembangan Surabaya*. Jurnal Balitbang Jawa timur, cakrawala edisi I, bulan ke-6

Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013 *Relasi Ekonomi-Politik Dalam Perspektif Dependencia* Ismah Tita Ruslin Jurusan Ilmu Politik Uin Alauddin Makassar

Suparmin. (2016). Fungsi Pengawasan dalam meningkatkan Keselamatan Penumpang Angkutan Penyeberangan Kapal Ferry Tradisional di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Sosiologi*. 4(1):126-140.

D. Internet

http://eprints.undip.ac.id/37089/2/5-Bab_II.pdf di akses pada tanggal 30 Desember 2018

http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf diakses pada tanggal 5 Desember 2018

Alif Kholifah, “Pemerintah Terus Berupaya Wujudkan Poros Maritim Dunia”, dalam <http://redaksiindonesia.com/read/pemerintah-terus-berupaya-wujudkan-poros-maritim-dunia.html>, akses 16 Agustus 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Tol_Laut

https://www.academia.edu/6708759/Teori_Sistem_Dunia_World_System_Theory diakses pada tanggal 30 Desember 2018 pukul. 16.00 WIB

Veive Large Hamenda, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*, Jurnal Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013. www.portalgaruda.org. Transportasi%20Laut.pdf di akses pada tanggal 24 Juli 2019 Pukul. 19.45 WIB

<https://www.teraslampung.com/inilah-kapal-termewah-indonesia-jalur->

www.google.com/m?q=keadilan+menurut+rawls+implementasi+keadilan+sosial+Indonesia+anil+dawan&client=ms-opera-mini&channel=new

www.pengertianahli.com/2013/05/pengertian-pancasila-sebagai-dasar.html?m=1#_

Huijbers Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Cetakan VIII, Yogyakarta, id.m.wikipedia.org/wiki/Negara_kesatuan.

Eka Wijaya, *Program “Tol Laut” Presiden Telah Dijalankan, Disparitas Harga Dihilangkan*, <http://setkab.go.id/program-tol-laut-presiden-telah-dijalankan-disparitas-harga-dihilangkan/>, Diakses 10 Agustus 2017

E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991) Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Penerbit Aneka Ilmu, 1977)

A.S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford : Oxford University Press, 1995)

F. Wawancara:

Wawancara intensif dengan Direktur ASDP Ferry Indonesia Sorong Papua Barat tanggal 28 Mei 2019, pukul: 14.00 WIB

Wawancara intensif dengan Direktur ASDP Ferry Indonesia Aceh tanggal 4 Juni 2019, pukul: 09.00 WIB

Wawancara intensif dengan Direktur ASDP Ferry Indonesia Ternate tanggal 17 Juni 2019, pukul: 13.00 WIB

Wawancara intensif dengan Pengelola Kapal Swasta Sorong Papua Barat tanggal 28 Mei 2019, pukul: 15.00 WIB